



Bentuk dan Fungsi Implikatur Pragmatik pada Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo di Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2024

Maulana Danar Maalikh^{1*}, Allika Fadiyah Hasna², Febri Adi Rusyanto³

^{1,2}Universitas Sebelas Maret, Indonesia

² SMP Khusus Olahraga Surakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: maulanadanarmh@student.uns.ac.id

Abstract. *Language in a state address functions not only as a medium for delivering information but also as a political communication tool rich in meaning and pragmatic strategies. This study describes the forms and functions of implicature found in President Joko Widodo's State Address at the 2024 Annual Session of the People's Consultative Assembly (MPR RI). The study focuses on two aspects: (1) the types of implicature, consisting of conventional and nonconventional implicatures, and (2) the functions of implicature, including assertive, directive, expressive, and commissive functions. The research employs a descriptive qualitative method with a pragmatic approach and content analysis. The data, in the form of utterances containing implied meanings, were collected using the listening and note-taking techniques and analyzed based on Grice's implicature theory and relevant pragmatic frameworks. The results show that President Joko Widodo's state address contains two types of implicature: conventional implicature, which carries explicit and commonly understood meanings, and nonconventional implicature, which requires contextual interpretation because of its implicit nature. Furthermore, four functions of implicature were identified: (1) assertive, used to express facts and the speaker's beliefs; (2) directive, containing appeals and encouragement to continue national development; (3) expressive, conveying gratitude and appreciation to national institutions; and (4) commissive, emphasizing the President's commitment to maintaining international trust and national sovereignty. Overall, the findings reveal that the use of implicature in the state address serves as an effective and polite political communication strategy. Through implied meanings, the President successfully conveys moral messages, motivation, and national values in a diplomatic and authoritative manner.*

Keywords: *Annual Session Of MPR RI; Implicature; Pragmatics; President Joko Widodo; State Address.*

Abstrak. Bahasa dalam pidato kenegaraan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai alat komunikasi politik yang sarat makna dan strategi pragmatik. Kajian ini mendeskripsikan bentuk dan fungsi implikatur yang terdapat dalam pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo di Sidang Tahunan MPR RI tahun 2024. Fokus kajian meliputi dua aspek, yaitu (1) jenis implikatur yang terdiri atas implikatur konvensional dan nonkonvensional, serta (2) fungsi implikatur yang mencakup fungsi asertif, direktif, ekspresif, dan komisif. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan pragmatik dan analisis isi (*content analysis*). Data berupa tuturan-tuturan dalam pidato Presiden yang mengandung makna tersirat dikumpulkan melalui teknik simak dan catat, kemudian dianalisis berdasarkan teori implikatur Grice serta teori pragmatik yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo memuat dua jenis implikatur, yaitu implikatur konvensional yang memiliki makna eksplisit dan mudah dipahami secara umum, serta implikatur nonkonvensional yang memerlukan penafsiran kontekstual karena bersifat tersirat. Selain itu, ditemukan empat fungsi implikatur: (1) fungsi asertif digunakan untuk menyatakan fakta dan keyakinan penutur, (2) fungsi direktif mengandung ajakan dan dorongan untuk melanjutkan pembangunan, (3) fungsi ekspresif mengekspresikan rasa terima kasih dan penghargaan terhadap lembaga negara, dan (4) fungsi komisif menegaskan komitmen Presiden dalam menjaga kepercayaan internasional dan kedaulatan bangsa. Secara keseluruhan, hasil kajian memperlihatkan bahwa penggunaan implikatur dalam pidato kenegaraan menjadi strategi komunikasi politik yang efektif dan santun. Melalui makna tersirat, Presiden mampu menyampaikan pesan moral, motivasi, serta nilai-nilai kenegaraan secara diplomatis dan berwibawa.

Kata Kunci: Implikatur; Pidato Kenegaraan; Pragmatik; Presiden Joko Widodo; Sidang Tahunan MPR RI.

1. LATAR BELAKANG

Bahasa sangat penting digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa digunakan dalam setiap kegiatan manusia. Pengetahuan terhadap konteks sangat diperlukan agar kegiatan berkomunikasi antar manusia dapat dipahami dengan mudah. Penutur dan lawan tutur harus memahami konteks dari sebuah percakapan agar tidak terjadi kesalahan dalam berkomunikasi. Suatu tuturan dapat dibentuk dengan menggunakan konteks. Pragmatik menelaah hubungan antara bahasa dan konteks yang tersandikan di dalam suatu struktur bahasa (Tarigan, 1986). Salah satu kajian yang dapat digunakan sebagai pemahaman konteks dalam pragmatik adalah implikatur. Implikatur di dalam pragmatik dapat digunakan sebagai gagasan yang sangat penting (Nadar, 2009).

Implikatur memberikan penjelasan yang tidak terbelit-belit tentang bagaimana cara memperbanyak implikasi daripada tuturan. Implikatur mengandung makna yang dapat dengan mudah dipahami tetapi sulit untuk mengungkapkan maksud yang ingin diungkapkan (Kridalaksana, 2001). Implikatur merupakan ungkapan hati, perasaan yang tersembunyi (Muntadiroh, 2020). Terdapat dua macam implikatur yaitu implikatur konvensional dan implikatur percakapan atau nonkonvensional (Mulyana, 2005). Implikatur konvensional diperoleh melalui makna kata sedangkan implikatur konvensional diperoleh melalui pemahaman terhadap hal yang dimaksud dalam konteks percakapan.

Tindak tutur dan modus tuturan dapat digunakan dalam berimplikatur. Implikatur memiliki fungsi tercermin terhadap maksud tuturan penutur terhadap lawan tutur pada suatu komunikasi, seperti implikatur dalam pidato. Implikatur dapat digunakan dalam komunikasi wacana baik secara lisan maupun secara tulisan. Pidato merupakan keterampilan mengenai berbicara yang di dalamnya terdapat kemampuan dalam menyampaikan suatu ide gagasan, dapat mengekspresikan cipta, rasa, dan karsa (Suharyanti, 2018). Pidato merupakan sebuah wacana yang di dalamnya mengandung implikatur. Pidato dan implikatur tidak dapat dipisahkan karena audiens harus mengerti konteks sehingga penyampaian gagasan tidak terjadi kekeliruan. Setiap ujaran penyampaian gagasan dalam berpidato mengandung makna tertentu. Kemahiran, keterampilan berbahasa, dan ketepatan penggunaan kalimat efektif diperlukan dalam berpidato agar makna dari gagasan dapat disampaikan dengan jelas.

Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI) di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang bertema suksesi Presiden 2024 merupakan salah satu momen penting dalam tatanan politik Indonesia dalam pergantian Presiden. Pidato ini bukan hanya merupakan sarana komunikasi antara eksekutif dan legislatif, tetapi juga menjadi wadah bagi Presiden untuk menyampaikan visi, arah kebijakan, dan prestasi pemerintah kepada rakyat

Indonesia dan dunia internasional. Pidato Kenegaraan ini juga memiliki implikasi yang mendalam dalam pembentukan opini publik dan pengaruhnya terhadap kebijakan negara.

Pemahaman terhadap pidato kenegaraan tidak hanya sebatas pada pemahaman isi pesan yang tersurat, melainkan juga pada pesan yang tersirat, yaitu implikatur. Implikatur adalah informasi yang diperoleh dari suatu pernyataan, meskipun pernyataan tersebut tidak secara langsung diungkapkan. Oleh karena itu, pendekatan pragmatik menjadi sangat relevan dalam menganalisis pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Pragmatik membantu dalam mengungkapkan makna yang lebih dalam dari pidato, mengidentifikasi pesan tersirat, serta memahami bagaimana pesan tersebut dipengaruhi oleh konteks dan tujuan komunikasi.

Penelitian mengenai implikatur dalam pidato Kenegaraan Presiden Jokowi juga memiliki relevansi sosial yang tinggi. Pemahaman lebih dalam terhadap pesan yang tersirat dalam pidato ini dapat membantu masyarakat untuk lebih kritis dalam menafsirkan pidato Kenegaraan Presiden, serta memahami tujuan politik yang mungkin terkandung dalam pidato tersebut. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan kepada pemerintah dan legislator mengenai bagaimana pesan-pesan tersirat dalam pidato Kenegaraan dapat mempengaruhi dinamika politik dan kebijakan di Indonesia.

Meskipun telah ada beberapa penelitian yang mengkaji pidato kenegaraan Presiden Jokowi, fokus pada analisis implikatur dengan pendekatan pragmatik masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan literatur ini dengan menganalisis penggunaan implikatur dalam pidato Kenegaraan Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR RI. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan temuan-temuan yang dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pesan tersirat dalam pidato ini, serta bagaimana pesan-pesan tersebut dapat memengaruhi persepsi publik, kebijakan negara, dan dinamika politik di Indonesia.

Penelitian tentang implikatur pernah dilakukan oleh Yulia, Sinaga, & Charlina pada tahun 2021. Penelitian tersebut berjudul “Implikatur dalam Pidato Presiden Jokowi pada Sidang Paripurna 18 Juni 2020”. Penelitian ini mengkaji implikatur pada Pidato Presiden Jokowi pada sidang paripurna 18 Juni 2020. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ditemukan dua jenis implikatur yaitu implikatur konvensional dan nonkonvensional. Penulis menemukan 8 fungsi implikatur, yaitu perintah, sindiran, sindiran dan perintah, pernyataan, peringatan, kritik, dukungan, saran, dan perintah.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Nawangsih pada tahun 2021. Penelitian tersebut berjudul “Implikatur Percakapan dalam Film Yowis Ben The Series (Kajian

Pragmatik)”. Hasil penelitian ini yaitu jenis-jenis implikatur percakapan ada dua yaitu implikatur percakapan umum dan implikatur percakapan khusus. Kemudian fungsi implikatur percakapan yang ditemukan yaitu fungsi implikatur asertif menegaskan, fungsi implikatur asertif menyatakan, fungsi implikatur asertif melaporkan, fungsi implikatur asertif mengeluh, fungsi implikatur direktif bertanya, fungsi implikatur direktif perintah, fungsi implikatur direktif memberi saran, fungsi implikatur direktif minta pertolongan, fungsi implikatur direktif mengharapkan, fungsi implikatur ekspresif ucapan terima kasih, fungsi implikatur ekspresif memuji, fungsi implikatur ekspresif minta maaf, fungsi implikatur ekspresif menyindir, fungsi implikatur komisif menjanjikan, fungsi implikatur komisif menawarkan, dan fungsi implikatur deklaratif menghukum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis isi (*content analysis*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam bentuk dan fungsi implikatur yang terdapat dalam pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo di Sidang Tahunan MPR RI. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran faktual dan sistematis mengenai makna-makna tersirat dalam pidato kenegaraan yang dikaji dari sudut pandang pragmatik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguraikan data kebahasaan secara tekstual, tetapi juga menafsirkan konteks komunikasi politik yang melatarbelakanginya.

Sumber data penelitian ini berupa video dan transkrip pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR RI yang disampaikan pada tanggal 16 Agustus 2024 dengan tema “*Sukses Presiden 2024*.” Data penelitian berupa tuturan-tuturan yang mengandung implikatur, baik implikatur konvensional maupun nonkonvensional. Pemilihan data dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan data berdasarkan pertimbangan relevansi dengan tujuan penelitian. Dengan teknik ini, hanya tuturan yang mengandung indikasi implikatur yang dianalisis lebih lanjut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode simak dan catat. Peneliti menyimak video pidato secara berulang untuk memastikan ketepatan konteks dan penafsiran, kemudian mencatat bagian-bagian tuturan yang mengandung unsur implikatur. Hasil pencatatan tersebut ditranskripsi ke dalam bentuk teks tertulis untuk memudahkan proses pengkodean dan analisis. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang melakukan pengamatan, pemilihan, interpretasi, dan penarikan makna terhadap data. Untuk

menjaga objektivitas, peneliti juga menggunakan pedoman analisis yang disusun berdasarkan teori implikatur Grice (1975).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi data, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan simpulan. Pada tahap identifikasi, peneliti menyeleksi tuturan yang mengandung implikatur. Selanjutnya, pada tahap klasifikasi, tuturan tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis implikatur, yaitu konvensional dan nonkonvensional. Tahap berikutnya adalah interpretasi, yaitu peneliti menafsirkan makna implikatur dengan mempertimbangkan konteks pragmatik pidato kenegaraan. Tahap akhir adalah penarikan simpulan yang berisi hasil temuan mengenai bentuk dan fungsi implikatur yang terdapat dalam pidato Presiden Joko Widodo. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi teori dengan membandingkan hasil analisis terhadap teori-teori pragmatik yang relevan agar diperoleh interpretasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis terhadap pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2024, ditemukan adanya dua jenis implikatur, yaitu implikatur konvensional dan implikatur nonkonvensional (percakapan). Kedua jenis implikatur tersebut muncul dalam konteks komunikasi kenegaraan yang bersifat politis dan persuasif. Selain itu, ditemukan pula empat fungsi utama implikatur dalam pidato tersebut, yaitu asertif, direktif, ekspresif, dan komisif.

Implikatur Konvensional

Implikatur konvensional dalam pidato ini tampak pada tuturan yang maknanya dapat dipahami secara umum tanpa memerlukan konteks khusus. Salah satu contohnya terdapat pada pernyataan:

“Saya ini bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres adalah partai politik atau gabungan partai politik.” (Data 1)

Tuturan tersebut termasuk implikatur konvensional karena maknanya dapat dipahami secara langsung berdasarkan kesepakatan umum dalam konteks politik Indonesia tanpa memerlukan penafsiran tambahan. Secara tersurat, Presiden menyatakan dirinya tidak memiliki kedudukan

sebagai ketua partai atau koalisi politik, namun secara tersirat tuturan ini mengimplikasikan bahwa penentuan calon presiden dan wakil presiden bukanlah kewenangannya, melainkan kewenangan partai politik sesuai dengan undang-undang. Implikatur konvensional ini memperlihatkan upaya Presiden untuk menegaskan posisi netral dan konstitusional dalam proses politik menjelang pemilu serta memberikan pengingat kepada publik agar memahami mekanisme demokrasi yang benar. Dari segi fungsi, tuturan ini bersifat asertif, yaitu menyatakan fakta dan mempertegas komitmen Presiden terhadap prinsip hukum dan etika kenegaraan.

Implikatur konvensional lain muncul pada kalimat:

“Bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia Emas 2045.” (Data 2)

Tuturan tersebut mengandung implikatur konvensional karena maknanya dapat dipahami secara umum tanpa memerlukan konteks situasional tambahan. Secara tersurat, Presiden menjelaskan bahwa peningkatan jumlah penduduk usia produktif merupakan peluang strategis bagi Indonesia untuk mencapai visi besar Indonesia Emas 2045. Namun, secara tersirat, tuturan ini mengimplikasikan ajakan kepada masyarakat dan pemerintah untuk mempersiapkan diri agar mampu memanfaatkan bonus demografi sebagai modal pembangunan nasional. Makna ini bersifat konvensional karena masyarakat secara luas telah memahami bahwa bonus demografi merupakan aset penting dalam pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa. Dengan demikian, implikatur konvensional pada tuturan ini berfungsi asertif, yaitu menyatakan fakta sekaligus menegaskan optimisme dan dorongan moral untuk bersama-sama memanfaatkan potensi penduduk produktif dalam mewujudkan Indonesia maju.

Implikatur Nonkonvensional

Implikatur nonkonvensional muncul pada tuturan yang maknanya bergantung pada konteks dan tidak dapat dipahami secara literal. Misalnya, Presiden menyatakan:

“Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah. Walaupun saya paham, ini sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-paten, dijadikan alibi, dijadikan tameng. Bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya sudah banyak dipasang di mana-mana.” (Data 3)

Tuturan tersebut mengandung implikatur nonkonvensional karena maknanya tidak dapat dipahami secara langsung, melainkan memerlukan penafsiran berdasarkan konteks situasi politik menjelang pemilu. Secara literal, Presiden menyatakan bahwa urusan pencalonan presiden dan wakil presiden bukan merupakan kewenangannya. Namun secara tersirat, tuturan ini mengimplikasikan kritik halus terhadap praktik politik yang menggunakan citra dan popularitas Presiden untuk kepentingan kampanye pihak tertentu. Ungkapan “dijadikan paten-paten, dijadikan alibi, dijadikan tameng” menyiratkan rasa keberatan atas penyalahgunaan nama dan foto dirinya oleh kelompok politik untuk memperoleh dukungan publik. Implikatur nonkonvensional ini menunjukkan adanya strategi kebahasaan yang diplomatis, di mana Presiden menyampaikan ketidaksetujuan tanpa menyebut pihak secara eksplisit. Dari segi fungsi, tuturan ini bersifat ekspresif sekaligus direktif, karena di satu sisi mengungkapkan perasaan pribadi terhadap situasi yang tidak nyaman, dan di sisi lain memberi isyarat kepada publik agar tidak menyeret nama Presiden dalam kepentingan politik praktis.

Contoh lain dari implikatur nonkonvensional terdapat dalam pernyataan:

“Apapun bisa disampaikan kepada presiden, mulai dari masalah rakyat di pinggir, kemarahan, ejekan, bahkan makian dan fitnah bisa dengan mudah disampaikan lewat media sosial. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, tolol, Firaun, tapi sebagai pribadi saya menerima saja.” (Data 4)

Tuturan tersebut mengandung implikatur nonkonvensional karena makna sebenarnya tidak tersurat secara langsung, melainkan dipahami melalui konteks komunikasi publik dan dinamika media sosial. Secara literal, Presiden menyatakan bahwa siapa pun dapat menyampaikan pendapat atau kritik kepadanya melalui media sosial. Namun secara tersirat, tuturan ini mengimplikasikan sikap toleran dan kedewasaan emosional Presiden dalam menghadapi kritik serta penegasan terhadap kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi. Ungkapan “saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, tolol, Firaun, tapi sebagai pribadi saya menerima saja” menandakan bahwa Presiden memahami risiko menjadi figur publik yang selalu menjadi sasaran kritik, sekaligus menunjukkan keteguhan dan ketenangan dalam meresponsnya. Implikatur nonkonvensional ini berfungsi ekspresif, karena mengungkapkan perasaan dan sikap pribadi penutur terhadap situasi sosial, serta asertif, karena menegaskan nilai-nilai demokratis seperti keterbukaan dan kebebasan berekspresi di masyarakat.

Fungsi Implikatur

a. Fungsi Asertif

Fungsi asertif terlihat pada bagian pidato yang menyampaikan pernyataan atau keyakinan terhadap fakta kebangsaan. Misalnya, pada tuturan:

“68% penduduk Indonesia adalah usia produktif; di sinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita.” (Data 5)

Tuturan tersebut mengandung fungsi implikatur asertif, yaitu tuturan yang menyatakan keyakinan penutur terhadap suatu kebenaran atau fakta. Secara tersurat, Presiden menyampaikan data demografis bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berada pada usia produktif. Namun secara tersirat, tuturan ini mengimplikasikan optimisme dan kepercayaan Presiden bahwa keberhasilan pembangunan nasional bergantung pada kemampuan bangsa dalam memanfaatkan potensi generasi produktif tersebut. Implikatur ini menunjukkan keyakinan penutur terhadap pentingnya sumber daya manusia sebagai kunci kemajuan ekonomi dan sosial bangsa. Dengan demikian, fungsi asertif pada tuturan ini adalah menyatakan dan menegaskan fakta strategis bahwa bonus demografi merupakan modal utama dalam mewujudkan produktivitas dan kesejahteraan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

b. Fungsi Direktif

Fungsi direktif muncul dalam bentuk ajakan atau dorongan untuk bertindak, pada tuturan:

“Ini bukan tentang siapa yang jadi presidennya, tapi apakah sanggup atau tidak untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita mulai.” (Data 6)

Tuturan tersebut mengandung fungsi implikatur direktif, yaitu tuturan yang bertujuan memengaruhi atau mengarahkan pendengar agar melakukan suatu tindakan. Secara tersurat, Presiden menyampaikan bahwa persoalan utama bukanlah siapa yang akan menjadi presiden berikutnya, tetapi kesiapan untuk melanjutkan pekerjaan dan program yang telah dirintis. Secara tersirat, tuturan ini mengimplikasikan ajakan dan dorongan kepada penerus pemerintahan serta masyarakat untuk memiliki komitmen, konsistensi, dan tanggung jawab dalam melanjutkan pembangunan nasional. Implikatur direktif ini berfungsi sebagai motivasi dan nasihat politik, agar setiap pemimpin atau pihak yang akan memegang amanah negara tidak hanya berorientasi pada jabatan, melainkan pada

keberlanjutan visi dan kerja nyata bagi bangsa. Dengan demikian, fungsi direktif dalam tuturan ini ialah mengajak dan mendorong tindakan nyata demi kesinambungan pembangunan Indonesia.

c. Fungsi Ekspresif

Fungsi ekspresif tampak dalam bagian pidato yang berisi ungkapan apresiasi dan rasa terima kasih, pada tuturan:

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia, OJK, KPK, Bawaslu, Komnas HAM, dan lembaga-lembaga nasional lainnya yang telah berkontribusi sesuai peran dan kewenangannya.” (Data 7)

Tuturan tersebut mengandung fungsi implikatur ekspresif, yaitu tuturan yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan, sikap, atau penghargaan penutur terhadap suatu keadaan. Secara tersurat, Presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai lembaga negara atas kontribusi mereka dalam menjalankan tugas dan fungsi kenegaraan. Namun secara tersirat, tuturan ini mengimplikasikan apresiasi dan penghargaan terhadap kerja sama antarinstansi yang telah berperan menjaga stabilitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Melalui implikatur ini, Presiden menunjukkan sikap hormat dan rasa bangga terhadap kinerja lembaga-lembaga negara, sekaligus mendorong mereka untuk terus menjaga integritas dalam menjalankan amanah publik. Dengan demikian, fungsi ekspresif pada tuturan ini adalah mengekspresikan rasa terima kasih dan penghargaan, serta memperkuat hubungan emosional dan profesional antara Presiden dan lembaga-lembaga penyelenggara negara.

d. Fungsi Komisif

Fungsi komisif tampak pada pernyataan komitmen dan janji politik Presiden, pada tuturan:

“Dengan international trust yang tinggi, kredibilitas kita akan lebih diakui, kedaulatan kita lebih dihormati, suara Indonesia lebih didengar. Kesempatan ini harus kita manfaatkan.” (Data 8)

Tuturan tersebut mengandung fungsi implikatur komisif, yaitu tuturan yang menyatakan komitmen, janji, atau kesanggupan penutur untuk melakukan sesuatu di masa mendatang. Secara tersurat, Presiden menyampaikan bahwa meningkatnya kepercayaan dunia

internasional terhadap Indonesia membawa dampak positif bagi posisi negara di kancah global. Namun secara tersirat, tuturan ini mengimplikasikan komitmen pemerintah untuk menjaga dan memanfaatkan kepercayaan internasional tersebut demi kepentingan nasional. Pernyataan “*kesempatan ini harus kita manfaatkan*” menunjukkan adanya janji tidak langsung bahwa pemerintah akan bertindak proaktif dalam memperkuat diplomasi, meningkatkan kredibilitas ekonomi, dan memperluas pengaruh Indonesia di dunia. Dengan demikian, fungsi komisif dalam tuturan ini adalah menunjukkan tekad dan tanggung jawab Presiden untuk mempertahankan serta mengoptimalkan kepercayaan global, sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan dan martabat Indonesia di tingkat internasional.

Pembahasan Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo di Sidang Tahunan MPR RI mengandung dua jenis implikatur, yaitu implikatur konvensional dan implikatur nonkonvensional atau percakapan. Temuan ini sejalan dengan teori Grice (1975) yang menyatakan bahwa implikatur merupakan makna tidak langsung yang muncul akibat pelanggaran atau penyimpangan terhadap maksim percakapan. Dalam konteks pidato kenegaraan, implikatur digunakan sebagai strategi komunikatif Presiden untuk menyampaikan pesan politis dengan cara yang santun, halus, dan kontekstual tanpa harus mengungkapkannya secara eksplisit.

Implikatur konvensional pada pidato Presiden Jokowi mencerminkan makna yang sudah disepakati secara umum dalam masyarakat, seperti ketika Presiden menegaskan bahwa penentuan calon presiden dan wakil presiden adalah kewenangan partai politik. Tuturan tersebut mengandung makna konvensional yang mudah dipahami khalayak luas tanpa perlu penafsiran konteks khusus. Sementara itu, implikatur nonkonvensional tampak dalam bagian pidato yang menyinggung fenomena pencantuman foto Presiden bersama calon presiden tertentu sebelum masa kampanye dimulai. Melalui implikatur tersebut, Presiden secara halus menyampaikan kritik terhadap praktik politik yang tidak etis tanpa menyebut pihak tertentu. Penggunaan bentuk implikatur seperti ini memperlihatkan kehati-hatian dalam berbahasa politik serta menunjukkan kecerdasan pragmatik penutur dalam menjaga citra kenegaraan.

Jika dibandingkan dengan penelitian Gultom, dkk. (2019) yang berjudul “*Implikatur dalam Kampanye Pemilihan Presiden 2019*”, penelitian ini memiliki kesamaan pada temuan jenis implikatur, yaitu implikatur konvensional dan nonkonvensional. Namun, perbedaan utama terletak pada fungsi implikatur yang ditemukan. Gultom dkk. mengidentifikasi delapan

fungsi implikatur, antara lain perintah, sindiran, peringatan, kritik, dukungan, dan saran. Sementara itu, penelitian ini hanya menemukan empat fungsi utama, yaitu asertif, direktif, ekspresif, dan komisif. Hal ini menunjukkan bahwa pidato kenegaraan tahun 2024 cenderung lebih formal, diplomatis, dan menghindari bentuk implikatur yang bersifat kritis atau satiris, berbeda dengan pidato tahun 2020 yang bernuansa responsif terhadap situasi pandemi dan dinamika politik yang lebih tegang.

Selain itu, temuan penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian Nawangsih (2021) yang meneliti *implikatur percakapan dalam film Yowis Ben The Series*. Kedua penelitian sama-sama mengungkapkan bahwa implikatur tidak hanya hadir dalam komunikasi sehari-hari, tetapi juga dalam wacana formal seperti pidato kenegaraan. Namun, terdapat perbedaan konteks dan fungsi. Dalam penelitian Nawangsih, implikatur berfungsi menciptakan efek humor dan membangun relasi sosial antartokoh. Sebaliknya, dalam penelitian ini, implikatur berfungsi sebagai sarana persuasi politik dan penyampaian pesan moral secara implisit. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa konteks sosial dan tujuan komunikasi memengaruhi bentuk serta fungsi implikatur yang muncul dalam suatu tuturan.

Secara umum, hasil penelitian ini memperkuat pandangan Yuniarti (2014) bahwa implikatur merupakan sarana komunikasi efektif yang mampu menyampaikan makna secara halus dan strategis. Dalam konteks pidato kenegaraan, penggunaan implikatur menunjukkan kemampuan penutur dalam mengatur strategi kebahasaan untuk membangun citra positif, menjaga stabilitas politik, dan menanamkan pesan nasionalistik kepada masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi teori-teori pragmatik sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi baru pada ranah analisis wacana politik, khususnya dalam menafsirkan cara Presiden Jokowi mengelola makna tersirat sebagai bagian dari komunikasi kenegaraan yang diplomatis dan komunikatif.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo di Sidang Tahunan MPR RI tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa pidato tersebut mengandung dua jenis implikatur, yaitu implikatur konvensional dan implikatur nonkonvensional (percakapan), yang berfungsi menyampaikan pesan-pesan politis dan moral secara halus, kontekstual, dan strategis. Implikatur konvensional muncul pada tuturan yang maknanya dapat dipahami secara umum, seperti penegasan posisi Presiden yang netral secara politik dan ajakan untuk memanfaatkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Sementara itu, implikatur nonkonvensional ditemukan pada tuturan yang mengandung makna tersirat, seperti kritik

terhadap praktik politik yang menggunakan citra Presiden serta penegasan sikap toleran terhadap kritik publik. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan adanya empat fungsi utama implikatur, yaitu asertif, direktif, ekspresif, dan komisif. Fungsi asertif digunakan untuk menyatakan keyakinan dan fakta kebangsaan; fungsi direktif untuk mengarahkan dan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan; fungsi ekspresif untuk menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan terhadap lembaga negara; serta fungsi komisif untuk menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kepercayaan internasional dan kedaulatan bangsa. Secara keseluruhan, penggunaan implikatur dalam pidato kenegaraan ini menunjukkan kecerdasan pragmatik dan strategi komunikasi politik Presiden Joko Widodo dalam membangun citra kepemimpinan yang santun, demokratis, dan berwibawa. Melalui pemanfaatan makna tersirat, Presiden mampu menyampaikan pesan-pesan penting dengan cara yang diplomatis, efektif, dan tetap menjaga keharmonisan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Aini, T. Q., Revita, I., & Aslinda, A. (2021). Fungsi implikatur dalam tuturan Najwa Shihab di acara “Gelar Wicara Mata Najwa” episode “Menangkal Corona dan Menanti Terawan.” *Silampari Bisa: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia, Daerah, dan Asing*, 4(2).
- Astuti, R. W., Waluyo, H. J., & Rohmadi, M. (2019). Kajian pragmatik implikatur pada film animasi Nussa dan Rara. In *Prosiding Seminar Nasional “Inovasi Pembelajaran Bahasa Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0”* (pp. 95-98).
- Gultom, R. G., Sinaga, M., & Charlina, C. (2019). Implikatur dalam kampanye pemilihan presiden 2019. *JURNAL TUAH: Pendidikan dan Pengajaran Bahasa*, 3(2), 90-102.
- Irma, C. N., & Sulfiana, S. (2019). Analisis fungsi dan bentuk implikatur dalam iklan Sprite: Kenyataan yang menyegarkan di televisi. *Hasta Wiyata*, 2(2), 91-97.
- Juniati, S. (2019). Implikatur wacana humor dalam webtoon “Tahi Lalats” karya Nurfadli Mursyid. *Cendekia: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 7(1), 130-141.
- Kridalaksana, H. (2001). *Kamus linguistik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Marpaung, D. I., Burhanudin, D., & Sinaga, M. Implikatur percakapan dalam novel Melodylan karya Asri Aci. *JURNAL TUAH: Pendidikan dan Pengajaran Bahasa*, 3(2), 131-139.
- Mulyana, D. (2005). *Ilmu komunikasi suatu pengantar*. PT Remaja.
- Muntadiroh, F. (2020). Implikatur konvensional dalam dongeng Der Singende Knochen karya Brüder Grimm. *IDENTITAET*, 9(2).
- Nababan, E. B., Boangmanalu, I. A., & Darmaningtyas, A. A. (2021). Analisis implikatur pada acara Catatan Najwa bertajuk eksklusif Ma’ruf Amin soal wapres yang terlupakan. *Kode: Jurnal Bahasa*, 10(1).
- Nadar, F. (2009). *Pragmatik dan penelitian pragmatik*. Graha Ilmu.

- Nawangsih, P. E. (2021). Implikatur percakapan dalam film Yowis Ben The Series (kajian pragmatik). *JOB (Jurnal Online Baradha)*, 17(1), 411-441.
- Nida, S. K., Sunarti, I., & Riadi, B. (2018). Implikatur dalam kampanye Pilkada Gubernur Jakarta 2017-2022 dan implikasinya di SMP. *Jurnal Kata (Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya)*, 6(3).
- Tarigan, H. G. (1986). *Pengajaran pragmatik*. ANGKASA.
- Tauk, M., Momang, H. D., & Yuliantari, A. P. (2022). Implikatur dalam tuturan Abdur Arsyad pada acara Stand Up Comedy Indonesia Season 4: Kajian pragmatik. *PROLITERA: Jurnal Penelitian Pendidikan, Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 5(1), 76-92.
- Yule, G. (2006). *Pragmatik* (I. F. Wahyuni, Trans.). Pustaka Pelajar.
- Yulia, M., Sinaga, M., & Charlina, C. (2021). Implikatur dalam pidato Presiden Jokowi pada sidang paripurna 18 Juni 2020. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 10897-10903.
- Yuniarti, N. (2014). Implikatur percakapan dalam percakapan humor. *Jurnal Pendidikan Bahasa*, 3(2), 225-240.